

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di pandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Beras merupakan komoditi yang memberikan sumbangan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 19.44% di perkotaan dan 27.48% di wilayah pedesaan (Lampiran 1). Oleh sebab itu dalam masalah beras di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi pemberasan nasional (BPS, 2019).

Masalah pangan dari tahun ke tahun menjadi perhatian pemerintah. Soetrisno (1993) menyatakan bahwa masalah pokok pangan yang dihadapi Indonesia adanya ketimpangan produksi antar daerah dan antar waktu. Kegiatan angkutan merupakan salah satu mata rantai penting dalam usaha mencapai sasaran pembangunan pangan. Karena itu adanya angkutan yang lancar diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan secara merata, sehingga mampu menunjang terciptanya stabilitas harga (Lorensia, 1996).

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, masalah ini menjadi perhatian nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Beras hingga kini masih merupakan komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sangat besar. Indonesia memiliki tingkat konsumsi jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain yaitu mencapai 139/kapita pertahun. Bahkan beras sangat berperan dalam mempengaruhi kemiskinan Indonesia yaitu sebesar 64% (Ridho, 2016).

Kecukupan pangan bagi masyarakat merupakan hak asasi yang wajib untuk dipenuhi, dan pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk pemenuhannya. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara bagi kemakmuran rakyatnya. Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai institusi yang ditugaskan pemerintah melaksanakan tugas tersebut, dibebani tanggung jawab untuk mengendalikan agar stok beras dapat tersedia dalam jumlah yang mencukupi melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakannya (Natalia, 2016).

BULOG adalah lembaga pemerintahan yang di bentuk pada tanggal 10 Mei 1967 dengan tujuan pokok melaksanakan tugas pemerintah dibidang manajemen logistik melalui pengelolaan, persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan BULOG merupakan pekerjaan yang sangat kompleks serta mempunyai kaitan yang erat dengan keseimbangan produksi disatu pihak dan kegiatan konsumsi dilain pihak. dari kenyataan yang ada, produk pertanian dipengaruhi oleh musim, maka keseimbangan proses ini suar dikendalikan dan untuk mengendalikannya diperlukan proses pengadaan dan penyaluran khususnya beras yan menyangkut aspek logistik (transportasi).

Transportasi merupakan aktivitas logistik yang paling mahal. Biaya yang dihasilkan oleh aktivitas logistik lebih dari 40% dari keseluruhan biaya logistik (Frazelle, 2002). Oleh karena itu sistem distribusi dan transportasi harus dirancang dengan secara optimal sehingga diperoleh biaya yang seminimum mungkin. Belajar dari angkutan pangan khususnya beras yang dilaksanakan BULOG selama ini, sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian para pelaksana dilapangan baik di tempat penyimpanan, diperjalanan maupun di daerah penerima. Oleh karena itu, dalam melakukan efisiensi terhadap biaya angkut maka BULOG, khususnya bagi Divre Sumatera

Barat harus mengetahui rute terbaik dan jumlah pengiriman yang optimum agar biaya transportasi dapat diminimasi, hal ini menjadi landasan untuk meneliti bagaimanakah rute terbaik dan jumlah pengiriman yang optimum sebagai wujud optimasi yang dapat dilakukan dan diterapkan pada distribusi beras BULOG pada Divisi Regional Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan tugas dibidang manajemen logistik melalui pengelolaan, persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik harus melakukan kegiatan angkutan (transportasi) dalam rangka menyalurkan beras ke daerah tujuan agar terjangkau oleh masyarakat di Sumatera Barat.

Pola pengadaan beras pada BULOG dikenal dengan pola pengadaan beras Move Nasional (Movenas) yaitu pengiriman beras antar wilayah Divisi Regional (Divre) dan pola pengadaan beras Move Regional (Movereg) yaitu pengiriman beras antar wilayah Sub Divisi Regional). Pendistribusian beras antar daerah menimbulkan biaya transportasi, waktu dan Jarak antar kabupaten/kota yang jauh memerlukan biaya transportasi yang berbeda-beda. Selain itu distribusi beras yang dilakukan berulang 2-3 kali ke lokasi yang sama dari gudang berbeda dalam satu periode juga dapat menimbulkan tambahan biaya transportasi. Menurut hasil penelitian pada kegiatan distribusi beras Movereg ini terdapat 2 kali pengiriman kelokasi yang sama dalam periode tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi, apakah ada kekurangan stock persediaan atau kelebihan permintaan di kota tersebut sehingga dilakukan 2x distribusi yang menyebabkan adanya tambahan biaya transportasi. Dengan demikian transportasi (angkutan) merupakan kegiatan utama BULOG dalam penyaluran atau pendistribusian beras. Salah satu strategi untuk menghemat anggaran adalah dengan

menekan biaya seminimal mungkin, sehingga diperlukan sistem pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pengangkutan yang baik dengan biaya yang optimum. Untuk itu perlu adanya penelitian-penelitian yang terarah dan terencana mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan penyaluran beras ini terutama biaya transportasi analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui sistem distribusi dengan sedemikian rupa hingga diperoleh biaya yang optimum.

Maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana sistem distribusi beras pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat pada saat ini?
2. Bagaimana alokasi distribusi yang optimum sebagai solusi untuk mengoptimalkan biaya transportasi distribusi beras pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat?

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Biaya Distribusi Beras (Studi Kasus: Distribusi Move Regional Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat”**

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui sistem distribusi beras pada BULOG Divisi Regional Sumatera Barat saat ini
2. Menentukan alokasi distribusi beras yang optimum dengan biaya transportasi yang optimum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, dapat memperdalam pemahaman penulis tentang model transportasi dan mengembangkan wawasan disiplin ilmu yang telah dipelajari untuk mengkaji suatu permasalahan.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan solusi alternatif dalam membuat keputusan yang baik berdasarkan pemecahan masalah dari persoalan

optimalisasi sehingga di peroleh pengaturan transportasi degan jumlah biaya yang minimum.

3. Bagi pembaca, dapat sebagai referensi bagi pembaca terhadap masalah pendistribusian/transportasi dan Mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan transportasi serta dapat menggunakan model tersebut apabila menemukan masalah transportasi.

